

## Analysis Of The Impact Of Special Autonomy Funds/Privileges On Health And Education Spending On HDI In Special Autonomy Regions

Iqbal Nurfansyah<sup>1\*</sup>, Azansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Development, Economics, University of Bengkulu

<sup>2</sup>Department of Development, Economics, University of Bengkulu

Address: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371

Author correspondence: [iqbalnurfansyah39@gmail.com](mailto:iqbalnurfansyah39@gmail.com)

**Abstract:** *The real source of a country's riches and an essential component of its development are its people. We can determine the extent to which human resources are of high quality from the perspectives of the economy, health, and education thanks to the HDI. DKI Jakarta is the province in Indonesia with the highest HDI, while Papua and West Papua have the lowest HDIs. Both provinces get special funding known as special autonomy funds and are recognized as special autonomous areas. Even after Papua was given special autonomy funds twenty years ago, it is still the province in Indonesia with the lowest HDI. Improving the Human Development Index (HDI) mostly depends on spending in the areas of economy, health, and education. This study looks at the impact of spending on the economy, health, and education as well as local government expenditure (DOK) on the HDI. Using secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Statistics Agency (BPS), panel data regression is the study methodology employed. The study's findings show that DOK has a favorable impact on the HDI, as does spending on the economy, health, and education.*

**Keywords:** *Human Development Indeks, Special Autonomy Funds, Special Autonomy Region, Government Expenditure*

**Abstrak:** Sumber kekayaan sejati suatu negara dan komponen penting dalam perkembangannya adalah rakyatnya. Kita dapat menentukan sejauh mana sumber daya manusia berkualitas tinggi dari perspektif ekonomi, kesehatan, dan pendidikan berkat HDI. DKI Jakarta adalah provinsi di Indonesia dengan HDI tertinggi, sementara Papua dan Papua Barat memiliki HDI terendah. Kedua provinsi mendapatkan dana khusus yang dikenal sebagai dana otonomi khusus dan diakui sebagai daerah otonomi khusus. Meskipun Papua telah diberikan dana otonomi khusus dua puluh tahun yang lalu, provinsi ini masih memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagian besar bergantung pada pengeluaran di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Studi ini melihat dampak pengeluaran terhadap ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta pengeluaran pemerintah daerah (DOK) terhadap HDI. Menggunakan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), regresi data panel adalah metodologi penelitian yang digunakan. Temuan studi menunjukkan bahwa DOK memiliki dampak positif terhadap HDI, begitu juga dengan pengeluaran untuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

**Kata kunci:** Indeks Pembangunan Manusia, Dana Otonomi Khusus, Daerah Otonomi Khusus, Belanja Pemerintah

### INTRODUCTION

Manusia adalah kekayaan sejati suatu bangsa dan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Manusia memiliki peran sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, mampu mengelola diri sendiri dan semua potensi yang ada dalam bumi ini untuk mewujudkan kesejahteraan dalam tatanan kehidupan yang berkelanjutan. Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu negara, jika tidak ada peran manusia (SDM) yang mampu mengolah alam (tanah) agar dapat digunakan untuk kehidupan, itu tidak akan berarti. Pertumbuhan ekonomi dimulai oleh

distribusi sumber daya manusia yang efisien, sesuai dengan teori klasik. Pertumbuhan ekonomi memerlukan pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien.

Sumber daya manusia (SDM), yaitu kemampuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang dapat bersaing secara global, adalah pendorong utama transformasi ekonomi. Sumber daya manusia sangat penting dalam proses pengembangan, dan kemajuan suatu bangsa atau wilayah akan lebih terbantu oleh SDM yang berkualitas tinggi.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pembangunan manusia. IPM adalah metrik utama yang digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan. Fokus utama adalah meningkatkan hasil kesehatan, stabilitas ekonomi keluarga, dan standar pendidikan. Jalil & Kamaruddin (2018) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia dipengaruhi secara signifikan oleh lama sekolah rata-rata, lama sekolah yang diharapkan, harapan hidup, dan PDB per kapita.

Ketika berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia, ketiga komponen ini harus dipertimbangkan secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melacak standar hidup, pencapaian pendidikan, dan harapan hidup di seluruh negara di seluruh dunia. IPM diukur untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan untuk mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.

Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 72,91, meningkat sebesar 0,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini termasuk dalam klasifikasi tinggi, namun masih ada daerah di pulau-pulau Nusa Tenggara dan Papua yang memiliki IPM di bawah rata-rata, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Hampir semua pulau besar di Indonesia berwarna biru, yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di pulau-pulau ini tinggi. Namun, masih ada beberapa pulau dan kepulauan yang memiliki kategori IPM sedang, seperti Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua. Provinsi dengan HDI tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 81,65, kategori IPM sangat tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, dan provinsi terendah adalah Provinsi Papua dengan nilai 61,39.

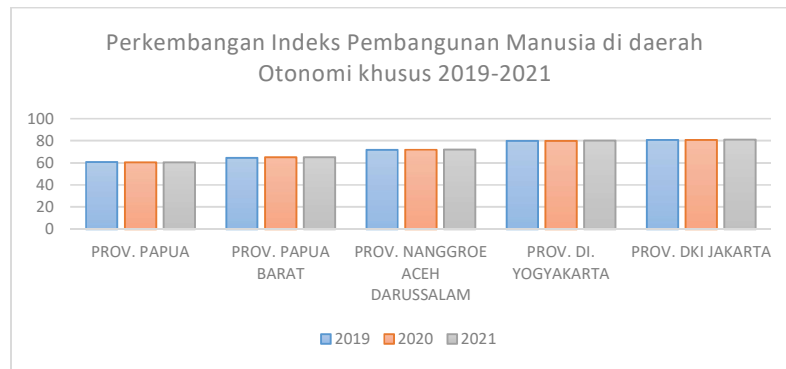
Gambar 1.1 Peta Indonesia berdasarkan nilai IPM



Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

Hal menarik yang dapat dilihat dari data ini adalah bahwa dua provinsi yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi adalah daerah otonomi khusus, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, sementara provinsi dengan IPM terendah adalah provinsi Papua, yang juga merupakan salah satu daerah otonomi khusus di Indonesia. Perbandingan IPM antara Provinsi dengan Daerah Otonomi Khusus dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2 Perkembangan Dana Otsus/Keistimewaan pada tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar di atas memperlihatkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah otonomi khusus pada tahun 2019-2021. Dapat dilihat bahwa di antara 5 daerah otonomi khusus, terdapat 2 daerah otonomi khusus yang masih memiliki IPM di bawah rata-rata, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai IPM pada tahun 2021 masing-masing sebesar 61,39 dan 65,89. Selama hampir 20 tahun sejak dana otonomi khusus pertama kali diberikan pada 2002-2022, Provinsi Papua tetap menjadi provinsi dengan IPM terendah di

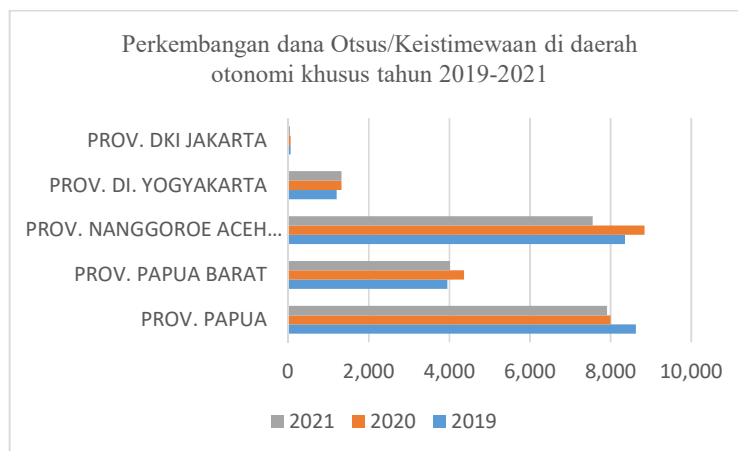
Indonesia. Meskipun provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki gelar yang sama sebagai Daerah Otonomi Khusus seperti DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta.

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) adalah dana yang diberikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan untuk membiayai otonomi khusus yang diterapkan di wilayah tertentu. Otonomi khusus merujuk pada kekuasaan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola wilayah mereka dengan mempertimbangkan tujuan dan keadaan komunitas lokal mereka. Untuk mengakui dan menghormati unit pemerintah daerah yang unik atau luar biasa, otonomi khusus diberikan.

Sebuah dasar untuk memberikan Otonomi Khusus ada dalam kasus Papua. Hal ini jelas terlihat dari alasan di balik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang memberikan Provinsi Papua Otonomi Khusus. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Provinsi Papua Barat keduanya berkaitan dengan Provinsi Papua Barat. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi, lokasi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Jakarta, dan lokasi lain yang diakui sebagai daerah khusus adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menetapkan satu daerah sebagai Daerah Istimewa: Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah ini disebut sebagai daerah otonomi khusus karena latar belakangnya yang unik yang membedakannya dari daerah lain.

Berlawanan dengan nilai indeks pembangunan manusia, dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat serta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menempati posisi paling rentan tertinggi pada tahun 2019-2021. Nanggore Aceh Darussalam Provinsi menempati posisi teratas dengan rata-rata DOK sebesar Rp. 8,251 Miliar, diikuti oleh Provinsi Papua dengan Rp 8,181 Miliar dan Papua Barat Rp 4,107 Miliar. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi keempat dengan rata-rata Dana Keistimewaan sebesar Rp. 1.280 Miliar dan akhirnya Provinsi DKI Jakarta dengan Rp. 54 Miliar.

**Gambar 1.3** Perkembangan dana Otsus/Keistimewaan di daerah otonomi khusus tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)



**Sumber:** Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK)

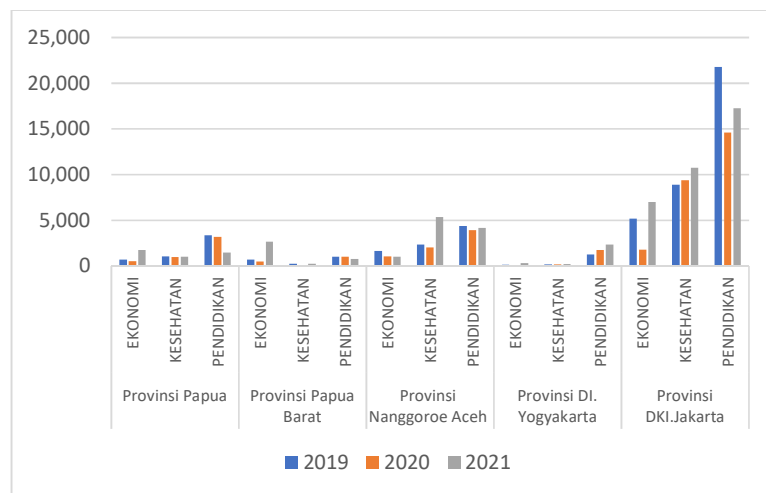
Kondisi Papua yang mengkhawatirkan berbanding terbalik dengan status otonomi khusus yang dimiliki provinsi tersebut. Status otonomi khusus Papua diperoleh sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang diterapkan di Indonesia. Pemerintah, dalam melaksanakan otonomi khusus, tidak hanya mengeluarkan undang-undang yang mendasarinya, tetapi juga menyediakan Dana Otonomi Khusus (DOK) untuk pelaksanaannya. (Budiratna & Qibthiyyah, 2020) menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi asimetris adalah delegasi wewenang yang lebih besar yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu ke daerah terkait dan dalam pelaksanaannya terdapat alokasi khusus dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Juliarni & Hatmoko (2020) menunjukkan jika Dana Otsus memiliki hubungan positif dengan IPM, baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, namun nilainya sangat kecil. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Widodo (2019) bahwa pendapatan Otonomi Khusus mempunyai dampak negatif pada efisiensi pengeluaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

Keynes berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat memiliki dampak positif pada IPM. Keynes menyatakan bahwa dalam situasi ketidakseimbangan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran publik, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks HDI, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang dapat berkontribusi pada peningkatan IPM.

Salah satu cara pemerintah mengeluarkan uang adalah dengan berbelanja. Pengeluaran regional adalah pengeluaran yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, layanan publik, pengembangan ekonomi, keamanan, dan lain-lain.

Tujuan pengeluaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, menyediakan layanan publik yang memadai, dan mengembangkan ekonomi di daerah tersebut.

**Gambar 1.4** Perkembangan belanja ekonomi, kesehatan dan pendidikan di daerah Otonomi khusus tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)



**Sumber:** Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK)

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa tingkat pengeluaran untuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di daerah otonomi khusus berfluktuasi pada tahun 2019-2021. Provinsi DKI. Jakarta adalah provinsi yang memiliki pengeluaran tertinggi dalam hal pengeluaran ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Rata-rata pengeluaran ekonomi di DKI Jakarta mencapai Rp 4.672 Miliar, pengeluaran kesehatan Rp 9.682 Miliar, dan pengeluaran pendidikan Rp 17.879 triliun. Sementara itu, provinsi dengan pengeluaran terendah adalah D.I Yogyakarta dengan rata-rata pengeluaran ekonomi sebesar Rp. 208 Miliar, pengeluaran kesehatan Rp. 195 miliar, dan pengeluaran pendidikan Rp. 1.793 Miliar. Provinsi Aceh memiliki belanja ekonomi sebesar Rp. 1.228 miliar, belanja kesehatan Rp. 3.248 miliar, dan belanja pendidikan Rp. 4.149 Miliar. Sementara itu, Provinsi Papua memiliki belanja ekonomi sebesar Rp. 1.000 miliar, belanja kesehatan Rp. 1.007 Miliar, dan belanja pendidikan Rp. 2.676 miliar. Provinsi Papua Barat memiliki belanja ekonomi sebesar Rp. 1.284 miliar, belanja kesehatan Rp. 202 miliar, dan belanja pendidikan Rp. 930 miliar. Kesamaan yang dapat dilihat dari pengeluaran antara daerah otonomi khusus di atas adalah bahwa pengeluaran untuk pendidikan merupakan pengeluaran terbesar di antara pengeluaran lainnya. Seprtiani, dkk. (2023) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah/kota di Provinsi Bengkulu. Rambeli, dkk. (2021) dalam penelitian mereka

menyimpulkan bahwa kebijakan keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan pendidikan untuk negara dalam jangka panjang. Pengembangan keuangan dipandang sebagai katalis utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di masa depan.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Teori Perkembangan Manusia (Human Capital)**

Secara linguistik, modal manusia terdiri dari dua dasar: individu dan modal. Faktor produksi yang dikenal sebagai modal adalah faktor yang digunakan untuk menciptakan suatu barang atau jasa tanpa menghabiskannya dalam proses produksinya. Menurut konsep modal ini, manusia, seperti mesin dan teknologi, merupakan jenis modal dalam modal manusia. Dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, dan transaksi, manusia berperan atau bertanggung jawab.

Tiga konsep dapat digunakan untuk menggambarkan modal manusia seiring dengan perkembangan teori ini. Ide pertama adalah modal manusia sebagai komponen yang terpisah. Menurut teori ini, modal manusia merujuk pada kemampuan manusia seperti pengetahuan dan keterampilan. Rastogi (2002) memberikan penjelasan mengenai hal ini dengan menyatakan bahwa modal manusia terdiri dari pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan kualitas manusia. Menurut ide kedua, modal manusia didefinisikan sebagai informasi dan kemampuan yang diperoleh melalui berbagai pengalaman pendidikan, termasuk program pelatihan, sekolah, dan kursus. Ide sentral dari model ini adalah bahwa modal manusia diperoleh melalui akumulasi proses tertentu. (Alan et al., 2008). Ide ini mengasumsikan bahwa modal manusia tidak berasal dari pengalaman. Ide ketiga mendekati modal manusia dari sudut pandang orientasi produksi. Modal manusia adalah sumber utama dari output ekonomi, menurut Romer. (1999). Manusia juga berinvestasi dalam modal manusia untuk meningkatkan produktivitas. (Rosen, 1999). Modal manusia, menurut Frank & Bernanke (2007), adalah kumpulan faktor yang mempengaruhi produktivitas manusia, termasuk pengetahuan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif.

Ada dua cara untuk memperoleh atau menghasilkan modal manusia. Pertama, berdasarkan jumlah numeriknya, orang-orang dipekerjakan sebagai tenaga kerja. Ini mengatakan bahwa ukuran tenaga kerja atau populasi meningkat seiring dengan produktivitas. Kedua, cara utama untuk memperoleh atau meningkatkan modal manusia adalah melalui investasi. Manusia akan menjadi lebih mampu dan terampil sebagai hasil dari pendidikan dan pelatihan mereka, yang akan meningkatkan produktivitas. Menurut Todaro (2002), bidang kesehatan dan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur modal manusia. Seseorang dapat

menjadi lebih berharga melalui pendidikan dan pelatihan. Ini masuk akal jika seseorang percaya bahwa bakat dan kemampuan individu meningkat seiring dengan tingkat pendidikan atau pelatihan. Sementara itu, terdapat hubungan antara bidang kesehatan dan pendidikan. Produktivitas tidak akan meningkat dengan lebih banyak pendidikan jika kesehatan tubuh seseorang tidak baik. Sementara itu, pendidikan yang lebih baik juga mungkin mempengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan dalam pembangunan sosial-ekonomi. (Biggeri & Mauro 2018). Metrik utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah indeks pembangunan manusia, atau IPM. Meningkatkan hasil kesehatan, stabilitas ekonomi keluarga, dan standar pendidikan adalah area utama yang perlu difokuskan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ada hubungan antara ketiga item ini. Ketiga faktor ini harus diperhitungkan secara keseluruhan ketika membahas pengembangan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia, atau IPM, membandingkan harapan hidup, tingkat pendidikan yang dicapai, dan standar hidup di seluruh negara di dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan suatu negara dan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap standar hidup.

IPM adalah rata-rata geometrik dari indeks pengeluaran, pendidikan, dan kesehatan. Setiap komponen HDI pertama-tama distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Rumus berikut diterapkan:

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan \times Ipendidikan \times Ipengeluaran}$$

dimana :

X1 = Kesehatan

X2 = Pendidikan

X3 = Pengeluaran

Sen berpendapat bahwa pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (yang diwakili oleh IPM) bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga merupakan sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Sen, negara-negara dengan IPM tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil dan sangat kompetitif karena populasi mereka lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih produktif. Meningkatkan IPM memberikan dasar agar menambah produksi individu yang kolektif, yang



akan mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. Dalam teorinya tentang "Pendekatan Kapabilitas," Sen menekankan bahwa fokus pada peningkatan IPM adalah bentuk investasi manusia yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang.

Sementara IPM dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan dalam kualitas hidup manusia, itu juga dapat digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan kualitas hidup manusia. (Safuridar & Putri, 2019). Ini berarti bahwa jika suatu daerah memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, bisa diartikan meningkatnya tingkat kesejahteraan, dan sebaliknya, ketika nilai IPM di suatu daerah menurun, artinya kurangnya kesejahteraan masyarakat, karena nilai IPM langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan tidak ada penelitian di mana nilai IPM rendah tetapi suatu daerah makmur.

### **Dana Otonomi Khusus/Keistimewaan**

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2016, dana OTSUS adalah dana yang ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah/kota sesuai dengan prioritas. Yani (2013) menyatakan bahwa dana otonomi khusus adalah pendapatan pemerintah daerah OTSUS yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, mendorong ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dana otonomi khusus dimaksudkan untuk mendorong daerah dengan status otonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Tidak diragukan lagi, transfer dana otonomi khusus dari pemerintah pusat memengaruhi pendapatan dan belanja daerah. ) APBD.

Menurut Yulianti, dkk. (2024), dana otonomi khusus di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap HDI di Provinsi Aceh, sementara dana otonomi khusus di sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM. Disisi lain tumbuhnya kegiatan perekonomian tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Otsus di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Sesuai dengan penelitian Rahman (2024), pelaksanaan Transfer Dana Otonomi Khusus telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, seperti yang ditunjukkan oleh variabel ADHB per kapita GRDP. Berdasarkan Koefisien Determinasi, Realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus dari tahun 2014 hingga 2022 mampu menjelaskan 94,2% dari nilai ADHB per kapita GRDP di provinsi-provinsi tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi di daerah penerima. Dari tahun 2014 hingga 2022, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Dana Otonomi Khusus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan di provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Ini adalah hal yang positif karena dana signifikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia

setiap tahun diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pengembangan ekonomi. Juliarni & Hatmoko (2020) menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus memiliki hubungan positif dengan IPM, baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, tetapi nilainya sangat kecil.

Namun, penelitian oleh Arispen & Rahmi (2021) menemukan bahwa DOKA memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap IPM. Ini karena alokasi DOKA lebih banyak ditujukan untuk pembangunan fisik dalam layanan publik, disisi lain kemampuan untuk pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, atau program yang bisa meningkatkan kualitas hidup manusia tidak sebanyak pembangunan fisik. Oleh karena itu, alokasi DOKA masih dianggap tidak tepat sasaran meskipun pengembangannya dilakukan. Didukung oleh Penelitian yang dilakukan Isnadi dan Fikriah (2020) menunjukkan bahwa, meskipun lebih banyak uang dialokasikan untuk sektor infrastruktur, penurunan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh kuota minimal yang dialokasikan untuk pengembangan manusia, khususnya di bidang pendidikan. Melalui penelitian Firmansyah et al. (2021) menemukan bahwa komponen Dana Otonomi Khusus memiliki dampak yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tidak ada korelasi antara DOK dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dari tahun 2002 hingga 2009. Tidak ada korelasi antara Papua dari tahun 2002 hingga 2009. Menurut Duwith (2009)

Dana Khusus Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh pemerintah pusat karena status istimewanya yang diakui secara hukum oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari Dana Khusus ini adalah untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan kewenangan DIY dalam aspek-aspek yang dianggap khusus, seperti peraturan tentang budaya, tanah, tata ruang, dan lembaga pemerintahan daerah. Melalui penelitian Tjajanto, dkk. (2022), dana khusus Yogyakarta hanya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, yang berdampak signifikan terhadap kinerja pembangunan antara model kota dan kabupaten. Disisi lain, berdasarkan penelitian oleh Putra & Nugroho (2019), dampak dari dana khusus Yogyakarta berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat didorong lebih tinggi lagi melalui ketepatan waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan belanja pemerintah. Ini berarti bahwa ada proses percepatan efek pengganda dan pengurangan keterlambatan pada ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan.

### **Belanja Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikategorikan ke dalam 11 kategori sesuai dengan fungsinya,

masing-masing memiliki tujuan tertentu. Pada penelitian Febriani & Rambe (2022) Menggunakan uji kausalitas panel Granger menangkap hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, ditemukan bahwa terdapat hubungan dua arah antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran di lima wilayah di Indonesia. Namun, wilayah Maluku dan Papua terbukti memiliki hubungan satu arah. Pengeluaran ekonomi, kesehatan, dan pendidikan adalah pengeluaran yang paling sesuai dengan komponen IPM. Berdasarkan penelitian Firmansyah, dkk. (2022) Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Semua variabel secara bersamaan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua.

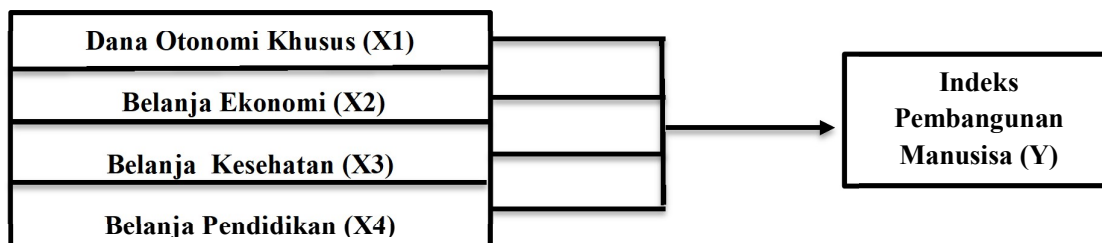
Menurut penelitian Sasongko & Wibowo dari tahun 2022, investasi dalam kesehatan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan manusia. Selain itu, studi menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia yang tinggi akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sementara itu, pengeluaran pemerintah daerah Indonesia untuk pendidikan memiliki dampak yang substansial dan merugikan terhadap pertumbuhan manusia. Dampak penting dan merugikan dari pengeluaran pendidikan adalah distribusi pengeluaran yang tidak merata di berbagai daerah. Pengeluaran untuk infrastruktur memiliki dampak yang merugikan dan signifikan terhadap kemajuan umat manusia. Hasil analisis deskriptif terhadap data anggaran pemerintah daerah untuk tahun 2013 - 2018 menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah untuk infrastruktur cenderung menurun selama periode 2013 - 2018.

Lescano, dkk. (2021) Pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan telah menjadi alat penting untuk meningkatkan pertumbuhan manusia dan ekonomi serta kualitas hidup penduduk. Namun, faktor-faktor organisasi dapat memiliki dampak yang signifikan, sehingga pengaruh kebijakan publik ini terhadap pertumbuhan manusia dan ekonomi melampaui sekadar seberapa banyak uang yang mereka terima. Menurut temuan studi ini, yang konsisten dengan penelitian Cousar, dkk. (2023), terdapat korelasi positif dan signifikan antara pengeluaran kesehatan saat ini dan harapan hidup saat lahir, pencapaian pendidikan, penyelesaian pendidikan menengah pertama, setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, serta pencapaian pendidikan, setidaknya menyelesaikan pendidikan tinggi siklus pendek. Hubungan jangka pendek dan jangka panjang ada antara pengeluaran kesehatan saat ini dan harapan hidup saat lahir, angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup), pencapaian pendidikan (setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar), dan pencapaian pendidikan. (at least completed junior secondary education). Chinedu (2022) Pada tingkat signifikansi 5%, hasil studi menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara PDB riil dan pengeluaran pemerintah untuk

pendidikan ( $\beta_1 = 0,639840$ ;  $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$ ). Menurut kesimpulan model, peningkatan satu naira dalam pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan menghasilkan peningkatan 64% dalam produk domestik bruto riil, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap sama. Sebuah bangsa tidak dapat mengalami kemajuan ekonomi tanpa adanya pendidikan.

Ditemukan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah dalam Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh signifikan dan berkorelasi negatif dengan variabel Tingkat Kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan program pendidikan yang tepat sasaran dan telah secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. (Taufiq & Akbar) Sebaliknya, pengeluaran pemerintah Yogyakarta untuk pendidikan menunjukkan dampak negatif dan signifikan terhadap IPM, meskipun secara tidak langsung melalui variabel pertumbuhan ekonomi, menurut penelitian Alifia (2018). Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Yogyakarta mungkin akan melambat akibat peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Namun, investasi pemerintah dalam layanan kesehatan memiliki dampak positif terhadap IPM.

### Hipotesis



Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran

Ada beberapa asumsi yang dapat dibuat berdasarkan masalah dan tujuan penelitian:  
 H0: Diduga bahwa Dana Otonomi Khusus, pengeluaran ekonomi, serta variabel kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap HDI di Daerah Otonomi Khusus.  
 H1: Diduga bahwa variabel Dana Otonomi Khusus, Pengeluaran Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Daerah Otonomi Khusus.

### METHOD RESEARCH

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data panel yang mencakup periode sepuluh tahun dari 2013 hingga 2022. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber resmi yang sudah ada.

Institusi-institusi termasuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data untuk studi ini. Studi ini menggunakan variabel dependen dan independen. Dana Otonomi Khusus (DOK), pengeluaran Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan adalah variabel independen yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Menurut Martono (2010), teknik penelitian ini yang menggunakan penelitian perpustakaan tidak hanya tentang memperoleh data tetapi juga dapat memperkaya pengetahuan tentang konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar penelitian dan juga sebagai panduan dalam proses pelaksanaan penelitian. Jadi, itu baik jika diadopsi dalam penelitian ini. Sementara itu, studi literatur dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang digunakan untuk membantu penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui artikel berita online, buku, dan penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk menemukan fakta dan memahami konsep metode yang akan digunakan.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Pengolahan data dalam studi ini menggunakan program Econometric Views Student Version 10 (Eviews) untuk model regresi yang dikembangkan dan menjadi prediktor yang baik. Estimasi atau penaksiran model regresi data panel dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu Efek Umum, Efek Tetap, dan Efek Acak. Kemudian, dilakukan sebuah uji untuk memilih model terbaik di antara tiga model, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini:

Persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 DOK_{it} + \beta_2 BE_{it} + \beta_3 BK_{it} + \beta_4 BP_{it} + t \epsilon_{it}$$

dimana :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

DOK = Dana Otonomi Khusus/Keistimewaan

BE = Belanja Ekonomi

BK = Belanja Kesehatan

BP = Belanja Pendidikan

i = Provinsi daerah otonomi khusus

t = waktu

e = eror

a = konstanta

b1, b2, b3 = Variabel independent

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fixed effect models, random effect models, dan common effect model digunakan dalam penelitian regresi data panel. Tabel di bawah ini menampilkan temuan masing-masing model.

**Table 1.1** Hasil estimasi regresi data panel

Variable	Common effect		Fixed effect		Random effect	
	t-stat	p-value	t-stat	p-value	t-stat	p-value
C	10.06318	0.0000	13.02492	0.0000	46.40263	0.0000
LOG_Dana Otsus/Istimewa	-5.757948	0.0000	-0.555100	0.5820	-26.55063	0.0000
LOG_Belanja ekonomi	-2.673380	0.0106	0.875895	0.3865	-12.32730	0.0000
LOG_Belanja kesehatan	0.609027	0.5457	2.240496	0.0308	2.808300	0.0075
LOG_Belanja pendidikan	2.365592	0.0226	3.697689	0.0007	10.90805	0.0000

Untuk melanjutkan penelitian, kita harus memilih model terbaik antara model efek umum, model efek tetap, dan model efek acak dengan mengujinya menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.

### Uji Chow

Effect test	Statistik	d.f	Prob.
Cross-section F	218.821.839	(4,39)	0.000
Cross-section Chi-square	151.419.997	4	0.000

Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik antara model efek umum dan model efek tetap. Berdasarkan hasil Uji Chow di atas, nilai probabilitas adalah  $0.0000 < 0.005$ , model yang dipilih adalah model Efek Tetap.

### Hausman test

Test	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	prob.
Summary			
Cross-section random	875.287.356	4	0.000

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara model efek tetap dan model efek acak. Hasilnya menunjukkan bahwa, dengan nilai probabilitas  $0,0000 < 0,005$ , model yang dipilih adalah model efek tetap. Oleh karena itu, uji Lagrange Multiplier (LM) tidak dilakukan karena, berdasarkan hasil dari dua uji sebelumnya, uji Chow dan uji Hausman, model efek tetap (FEM) akan dipengaruhi oleh hasil tetap.

### Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati, keuntungan menggunakan data panel adalah bahwa data tersebut tidak memerlukan pengujian asumsi klasik seperti normalitas dan autokorelasi. Verbeek (2000), Gujarati (2003), Wibisono (2006), Aulia (2004:27) dalam buku oleh Ajija et al. (2011:52). Namun, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas dapat dilakukan.

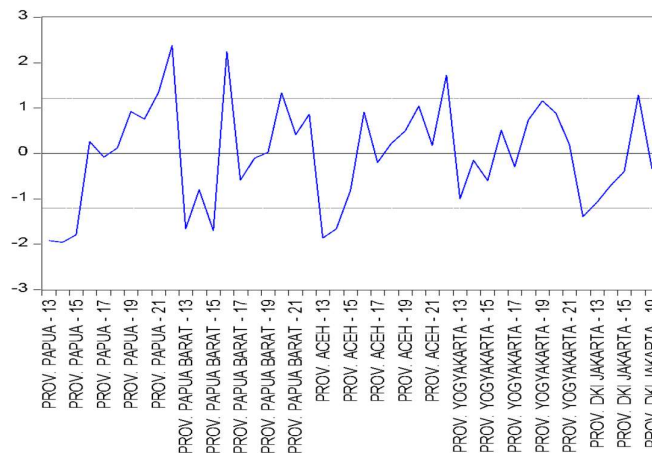
### Multicollinearity Test

**Table 1.2** Multicollinearity Test

	LOG_DOK	LOG_BE	LOG_BK	LOG_BP
LOG_DOK	1	- 0.1302496300556 947	- 0.1463766338 610299	- 0.23165436919 99729
LOG_BE	- 0.1302496300 556947	1	0.7769656202 828159	0.66199549016 2151
LOG_BK	- 0.1463766338 610299	0.7769656202828 159	1	0.86551681967 8183
LOG_BP	- 0.2316543691 999729	0.6619954901621 51	0.8655168196 78183	1

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, yang tidak melebihi 0,90 untuk korelasi antara variabel independen, dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak menunjukkan multikolinearitas. (Ghozali, 2013: 83).

### Heteroscedasticity Test



**Figure 1.3** Graph of residual heteroscedasticity

Dari grafik residual (biru) dapat dilihat bahwa ia tidak melebihi batas. (500 -500). Ini berarti bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas atau lulus uji heteroskedastisitas. (Napitupulu et al., 2021:143).

### Persamaan Regresi Data Panel

$$Y = 53.40 - 0.11X_1 + 0.34X_2 + 0.99X_3 + 1.13X_4$$

Berdasarkan model regresi, penjelasan berikut dapat diberikan. Nilai konstan dari Y adalah 53,40, yang berarti jika variabel Dana Otonomi Khusus, Belanja Ekonomi, serta Belanja Kesehatan dan Pendidikan sama dengan 0, maka variabel IPM adalah 53,40 dalam bentuk persentase, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

Nilai koefisien Dana Otonomi Khusus ( $x_1$ ) adalah negatif pada -0,11, yang berarti bahwa setiap peningkatan Dana Otonomi Khusus sebesar 1% (1 miliar) akan mengurangi indeks pembangunan manusia sebesar 0,11% dan sebaliknya.

Nilai Koefisien Pengeluaran Ekonomi ( $x_2$ ) adalah positif pada 0,34, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1% (1 miliar) dalam pengeluaran ekonomi akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,34% dan sebaliknya.

Koefisien pengeluaran kesehatan ( $x_3$ ) bernilai positif sebesar 0,99, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1% (1 miliar) dalam pengeluaran kesehatan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,99% dan sebaliknya.

Koefisien pengeluaran pendidikan ( $x_4$ ) memiliki nilai positif sebesar 1,13, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1% (1 miliar) dalam pengeluaran ekonomi akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 1,13% dan sebaliknya.



### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat apakah nilai koefisien regresi yang diperoleh signifikan. Hipotesis pada penelitian ini di uji menggunakan nilai signifikan 95% atau  $\alpha = 5\%$ . Di uji menggunakan aplikasi E-views 10.

**Tabel 1.4** Fixed effect model t-staistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.40796	4.100443	13.02492	0.0000
LOG_DOK (X1)	-0.116173	0.209282	-0.555100	0.5820
LOG_BE (X2)	0.347160	0.396349	0.875895	0.3865
LOG_BK (X3)	0.998827	0.445806	2.240496	0.0308
LOG_BP (X4)	1.133361	0.306505	3.697689	0.0007
Fixed Effects (Cross)				
ACEH--C	-0.788455			
DKI_JAKARTA--C	4.775976			
PAPUA--C	-10.85931			
PAPUA_BARAT--C	-3.376821			
YOGYAKARTA--C	11.20380			

Variabel dana otonomi khusus (x1) menghasilkan nilai t yang dihitung sebesar -0,555100 untuk hasil uji t, yang lebih kecil dari nilai sig dan 2,010635 pada tabel t. Karena 0.5820 lebih tinggi dari 0.05, H0 diakui. Fakta bahwa H1 ditolak menunjukkan bahwa IPM (Y) di zona otonomi khusus tidak terpengaruh secara signifikan oleh variabel dana otonomi khusus. (x1).

Variabel pengeluaran ekonomi (x2) menghasilkan nilai t yang dihitung sebesar 0,875895 dalam hasil uji t, yang lebih kecil dari hasil uji t tabel sebesar 2,010635. Selain itu, nilai sig sebesar 0,3865 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan penolakan terhadap H1. Penerimaan H0 menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang dapat dikenali dari variabel pengeluaran ekonomi. (x2). perlu dicatat di zona otonomi khusus untuk IPM (y).

Variabel pengeluaran kesehatan (x3) menghasilkan nilai t sebesar 2,240496 dalam temuan uji t, yang lebih tinggi daripada nilai t tabel sebesar 2,010635 dan nilai sig. Karena 0.0308 kurang dari 0.05, H0 tidak diterima. Penerimaan H1 menunjukkan dampak yang cukup besar dari variabel pengeluaran kesehatan (x3) terhadap IPM (y) di daerah otonomi khusus.

Variabel pengeluaran pendidikan (x4) menghasilkan nilai t sebesar 3,697689 dalam temuan uji t, yang lebih tinggi daripada hasil uji t tabel sebesar 2,010635 dan nilai sig. Karena 0.0007 lebih kecil dari 0.05, H0 tidak diterima. Penerimaan H1 menunjukkan dampak yang kuat dari variabel pengeluaran pendidikan (x4) terhadap IPM (y) di daerah otonomi khusus.

**Table 1.5** Hasil dari uji f-static and R<sup>2</sup>

R-squared	0.982818
Adjusted R-squared	0.979293
S.E. of regression	1.209677
Sum squared resid	57.06939
Log likelihood	-72.26266
F-statistic	278.8456
Prob(F-statistic)	0.000000

**Uji F**

Nilai sig dan nilai tabel f sebesar 2.5787 lebih kecil daripada nilai F yang dihitung sebesar 278.8456. Artinya, 0.000000 lebih kecil dari 0.05. Setelah itu, H1 disetujui dan H0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa HDI (y) di zona otonomi khusus dipengaruhi oleh variabel Dana Otonomi Khusus (x1), belanja ekonomi (x2), belanja kesehatan (x3), dan belanja pendidikan. (x4)

**Determination Coefficient Test (R<sup>2</sup>)**

Nilai R-kuadrat yang dikoreksi adalah 97,9293%, atau 0,979293. Variabel IPM di daerah otonomi khusus sebesar 97,6243% dapat dijelaskan oleh variabel independen, yang meliputi Dana Otonomi Khusus, Belanja Ekonomi, Belanja Kesehatan, dan Belanja Pendidikan, menurut nilai koefisien determinasi. Sementara itu, faktor-faktor yang tidak termasuk dalam studi ini menyumbang 2,3757% sisanya. (100-adjusted R square value).

**Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus/Keistimewaan terhadap IPM**

Posisi provinsi Papua dan Papua Barat dengan nilai HDI terendah di Indonesia dari tahun 2002-2022 menunjukkan bahwa penyediaan dana otonomi khusus selama 20 tahun dari 2002-2022 tidak memberikan dampak yang nyata pada perkembangan IPM di provinsi Papua. Untuk Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam memiliki tingkat IPM yang cukup baik dan berada di rata-rata nasional, tetapi masih jauh jika dibandingkan dengan Provinsi DI. Yogyakarta dan DKI Jakarta.

Dengan nilai t-statistik sebesar 0,555100 dan nilai sig sebesar 0,5820, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa DOK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di daerah otonomi khusus. sejalan dengan temuan studi Duwith (2009), yang tidak menemukan hubungan antara DOK dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua dari tahun 2002 hingga 2009. Arispen & Rahmi (2021) DOKA memiliki dampak negatif dan berpengaruh besar terhadap IPM. Ini karena pengembangan manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat memiliki kuota yang lebih kecil dibandingkan

dengan pengembangan fisik dalam layanan publik, sementara pengembangan fisik memiliki alokasi poin DOKA yang lebih besar. Dengan demikian, meskipun alokasi DOKA memiliki dampak yang signifikan dan menurunkan HDI, hal ini tetap dianggap tidak tepat sasaran.

Dalam penelitian mereka yang dilakukan oleh Isnadi dan Fikriah (2020), mereka menemukan bahwa meskipun lebih banyak uang dialokasikan untuk Dana Otonomi Khusus untuk sektor infrastruktur, kuota minimal yang dialokasikan untuk pengembangan manusia terutama di bidang pendidikan menjadi penyebab penurunan kesejahteraan masyarakat.

### **Analisis Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap IPM**

Berdasarkan pengujian hipotesis, investasi ekonomi memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap IPM di daerah otonomi khusus, dengan nilai t-statistik sebesar 0,875895 dan nilai sig sebesar 0,3865. Menurut penelitian oleh Komariah et al. (2019), pengeluaran pemerintah, yang merupakan proksi untuk pengeluaran modal, tidak memiliki dampak yang jelas terhadap HDI di Kabupaten Kotawaringin Timur antara tahun 2009 dan 2017.

Menurut Ostrom, dalam bukunya "Governing the Commons" (1990), belanja yang berfokus pada konsumsi dapat mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung pada kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya merugikan dimensi kesehatan dalam IPM. Studi oleh Sachs, (2022) Dalam sebuah laporan tentang pembangunan global, Sachs menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran konsumen tanpa investasi yang memadai dalam pendidikan dan kesehatan dapat memperlambat kemajuan IPM. Ia menekankan pentingnya investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup.

### **Analisis Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap IPM**

Berdasarkan pengujian hipotesis, pengeluaran kesehatan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM di daerah otonomi khusus. (t-static value of 2.240496, sig. 0.0308). Menurut penelitian Santoso et al. (2013), nilai Indeks Pembangunan Manusia di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh belanja pemerintah kabupaten/kota di sektor pendidikan dan kesehatan secara bersamaan.

Harsono et al. (2024) menyatakan bahwa pengeluaran kesehatan di provinsi NTB dari tahun 2013 hingga 2022 memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap IPM. Menurut penelitian Anantika & Sasana, 2020; Maulina & Andriyani, 2020, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM, dan setiap peningkatan pengeluaran kesehatan akan menyebabkan peningkatan IPM. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian ini. Selain itu, penelitian (Nurvita et al., 2022) menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas kesehatan dengan investasi pemerintah telah terbukti mendorong pertumbuhan manusia dan pada akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan fasilitas kesehatan dan fasilitas membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.

### **Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap IPM**

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan nilai t-statistik, investasi pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM di daerah otonomi khusus. Menurut pengujian hipotesis, pengeluaran kesehatan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM di daerah otonomi khusus. (t-static value of 3.697689, sig. 0.0007). Temuan dari penyelidikan Mongan (2019) mendukung kesimpulan ini. IPM di Indonesia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh proporsi GRDP yang dialokasikan untuk pendidikan oleh pemerintah daerah. Santoso dan yang lainnya (2024) Jumlah yang dibelanjakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk perawatan kesehatan memiliki dampak besar terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia setiap kabupaten/kota. Mongan (2019) IPM di Indonesia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh proporsi GRDP yang dialokasikan untuk pendidikan oleh pemerintah daerah. Harsono, dkk. (2024) Menurut temuan dari uji hipotesis, dari tahun 2013 hingga 2022, investasi pendidikan di provinsi NTB memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap IPM.

Sachs berpendapat bahwa investasi dalam pendidikan adalah cara yang terbaik dan efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam laporannya, ia menunjukkan bahwa negara-negara dengan pengeluaran pendidikan yang tinggi cenderung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih baik, karena pendidikan meningkatkan produktivitas dan kesehatan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa terdapat korelasi positif antara pengeluaran pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan di daerah tertentu sering kali diikuti oleh perbaikan dalam kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil tes yang dijelaskan sebelumnya, dapat di simpulkan.

1. Dana Otonomi Khusus (DOK) tidak berpengaruh terhadap IPM di daerah otonomi khusus pada tahun 2013-2022.
2. Pengeluaran ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap IPM di daerah otonomi khusus pada tahun 2013-2022.
3. Pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM di daerah otonomi khusus pada tahun 2013-2022.

4. Pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap IPM di daerah otonomi khusus pada tahun 2013-2022.

5. Dana Otonomi Khusus, Pengeluaran Ekonomi, Pengeluaran Kesehatan, dan Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Daerah Otonomi Khusus pada tahun 2013-2022. Bersama-sama, mereka memiliki pengaruh sebesar 97,62% terhadap IPM, sementara 2,38% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. penelitian luar.

### **IMPLIKASI/BATASAN DAN SARAN**

Pemerintah provinsi daerah otonomi khusus dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pengeluaran di sektor kesehatan dan pendidikan, yang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM di daerah otonomi khusus, menurut hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan. Perencanaan yang baik dan menyeluruh diperlukan oleh pemerintah agar dana dan pengeluaran tepat sasaran dan berdampak pada IPM. Kemudian, untuk dana otonomi khusus dan dana privilese, pemerintah seharusnya dapat melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap pengeluaran yang tepat dari dana-dana ini untuk menentukan efektivitas dan efisiensinya. Agar nantinya dana-dana ini dapat dikelola dengan bijak oleh pemerintah daerah.

Keterbatasan penelitian ini antara lain:

- a. Periode penelitian ini hanya 10 tahun, yaitu dari 2013-2022, sehingga terlalu kecil untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang daerah Otsus.
- b. Model Penelitian ini adalah Regresi data panel yang diperuntukan untuk melihat pengaruh sehingga tidak dapat melihat efisiensi.
- c. Penelitian ini hanya dilakukan di daerah otonomi khusus sehingga tidak dapat merangkum secara luas pengaruh variabel-variabel ini.

Saran yang bisa diberikan penulis :

1. Tambahkan periode penelitian yang lebih lama, misalnya 20 tahun atau sejak dana tersebut disalurkan.
2. Lakukan model penelitian menggunakan DEA (analisis envelop data) agar Anda dapat mengetahui seberapa efisien penggunaan dana otonomi khusus dan pengeluaran di daerah otonomi khusus.
3. Membandingkan daerah otonomi khusus yang tertinggal dalam hal IPM dengan daerah lain yang tidak termasuk dalam daerah otonomi khusus untuk melihat perbandingannya.

**REFERENCE**

- Akbar, M. K. F., & Taufik, M. (2023). the Effect of Government Expenditure for Education and Health Sectors on the Poverty Rate. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(4), 1187–1204.
- Arispen, A., Dewi Rahmi, & Ade Yunita Mafruhah. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 75–81. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>
- Ariwuni, M. A. D., & Kartika, I. N. (2019). Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(12), 2927–3958.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara W., H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.21009/jpeb.001.1.5>
- Baihaqi, A. B., & Puspitasari, P. (2020). Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal Publicuho*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12272>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/>
- Budiratna, H., & Qibtiyah, R. M. (2020). Evaluasi atas Transfer dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 1–13
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Fahrudin, A. A., & Susilo. (2022). ANALISIS PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(4), 504–519. <https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.4.01>
- Febriani, R. E., & Rambe, R. A. (2022). Government revenue and spending nexus in regional Indonesia: Causality approach. *Economics, Management and Sustainability*, 7(1), 34–42. <https://doi.org/10.14254/jems.2022.7-1.3>
- Firmansyah, F., Mukhtar, S., & Sebayang, K. D. A. (2022). the Effect of Special Autonomy Funds, Regional Original Revenue and Local Government Expenditures on Welfare in Papua Province. *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship (IJE3)*, 2(3), 601–609. <https://doi.org/10.53067/ije3.v2i3.101>
- Harsono, dkk. (2024). The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Human Development Index In NTB Province In 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpiaku.com/index.php/msej>
- Hayatun Nufus, & Jhon Andra Asmara. (2017). Pengaruh pendapatan sendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan dana otonomi khusus sebagai pemoderasi

- pada kab/kota di provinsi aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1–9.
- Isnadi, N., & Fikriah. (2019). Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 4(1), 29–37. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/12170>
- Jalil, S. A., & Kamaruddin, M. N. (2018). Examining the Relationship between Human Development Index and Socio-Economic Variables: A Panel Data Analysis. *Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship*, 3(2), 37–44. <https://doi.org/10.24191/jibe.v3i2.14431>
- Juliarini, A., & Hatmoko, A. W. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Tanah Papua. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 335–355).
- Kousar, S., Ahmed, F., Afzal, M., & Segovia, J. E. T. (2023). Is government spending in the education and health sector necessary for human capital development? *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01514-3>
- Lapian, A. L. C. P., Walewangko, E. N., Mandeij, D., & Yapanto, L. M. (2023). The Effect of Government Expenditure on Education and Health on Human Development Index in Boven Digoel District. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, 6(4), 294–300.
- Maghfirah & Purmini (2021) Pemerintah, A. B., Daerah, P., Khusus, O., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Bengkulu, U. *Analisis belanja pemerintah kabupaten/kota di indonesia: studi kasus pada daerah otonomi khusus*.
- Marlina, M., & Usman, U. (2020). Pengaruh Pdrb Dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Terhadap Kemiskinan Di Papua. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 15. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3202>
- Meydiasari, D. A., & Soejoto, A. (2017). Analisis pengaruh distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan*, 01(02), 116–126.
- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2023). Human development and decentralization: The importance of public health expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(1), 191–219. <https://doi.org/10.1111/apce.12373>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nurvita, D., Rohima, S., Bashir, A., & Mardalena, M. (2022). The Role of Public Spending on Education, Health, and Economic Growth toward Human Development Index in the

- Local Economy. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(June), 197–210. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.197-210>
- Okerekeoti, C. U. (2022). Government Expenditure on Education and Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Recent Research in Commerce Economics and Management (IJRRCEM)*, 9(2), 126–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6656411>
- Pahlevi, M. (2017). Impact of Governance and Government Expenditure on Human Development in Indonesia. *Research Paper of Master of Arts in Development Studies International Institute of Social Studies, December*, 61.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Peraturan Menteri Keuangan, No. 06/PMK.07/2012, Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan, No.165/PMK.07/2012, Tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Rahajeng Neysa Alifia, & Moh. Khusaini. (2024). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21744>
- Rambeli, N., Marikan, D. A. A., Podivinsky, J. M., Amiruddin, R., & Ismail, I. (2021). The dynamic impact of government expenditure in education on economic growth. *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1487–1507. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4318.2021>
- Santoso, S., Hamzah, A., & Syrchalad, N. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*, 1(4), 76–88.
- Sasongko, H. E., & Wibowo, P. (2022). Government Spending and Regional Economic Growth: the Mediating Effect of Human Development Index. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(2), 230. <https://doi.org/10.26418/jebik.v11i2.52229>
- Septriani, S., Hadiyanto, H., & Ekaputri, R. A. (2023). the Determinant Factors of Regional Expenditure. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 63–83. <https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.626>
- Setiawan, H. (2022). Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 13–23. <https://doi.org/10.31940/soshum.v12i1.13-23>
- Tamberan, Y. W., Tawakal, M. A., Betaubun, S., Lamalewa, F., Kore, E. L. R., & Anwar, A. I. (2020). The allocation of special autonomy funds and their impact on regional economic inequality in Papua Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012031>



- Tjahjanto, D. L., Fauzi, A., & Juanda, B. (2024). Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Tataloka*, 26(3), 143–153. <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.3.143-153>
- Wakarmamu, T., & Indrayono, Y. (2019). Spending and development in papua province of Indonesia. *Management Science Letters*, 9(12), 2131–2142. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.6.021>
- Widiprana, R. B. (2022). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. *Lensa Ekonomi*, 16(02), 200. <https://doi.org/10.30862/lensa.v16i02.246>
- Yulianti, R., Syahnur, S., Abrar, M., & Srinita, S. (2024). The Effect of Special Autonomy Fund Allocation for Education and Health on Human Development in Aceh Province, Indonesia. *Grimsa Journal of Business and Economics Studies*, 1(2), 96–106. <https://doi.org/10.61975/gjbes.v1i2.36>